



Efektivitas Penggunaan BKU Manual dalam Mendukung Penatausahaan SIPD RI di Kemantren Mergangsan

Abita Karuniawati^{1*}, Lilik Ambarwati²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi penulis: abitakarunia94@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to determine the reasons for using a manual General Cash Book (BKU) despite the implementation of SIPD RI, analyze the effectiveness of using the manual BKU in supporting local financial administration, and measure its impact on the efficiency, accuracy, and accountability of local financial management in Kemantren Mergangsan, Yogyakarta City. Data were obtained through in-depth interviews with officials and technical personnel directly involved in financial administration. The data analysis technique used was content analysis by grouping the interview results into the themes of effectiveness, efficiency, accuracy, and accountability. The results indicate that the manual BKU is still maintained because it provides fast access to data, serves as a data backup, and assists in the verification and internal control process when issues occur with SIPD RI. The use of the manual BKU is deemed effective in supporting the accuracy and accountability of financial administration. Therefore, the manual BKU remains relevant to be maintained as a complement to SIPD RI with limited and proportional use, rather than as the primary recording system.*

Keywords: *Accountability; Effectiveness; Manual BKU; Regional Financial Administration; SIPD RI.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penggunaan Buku Kas Umum (BKU) manual meskipun SIPD RI telah diterapkan, menganalisis efektivitas penggunaan BKU manual dalam mendukung penatausahaan keuangan daerah, serta mengukur dampaknya terhadap efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam penatausahaan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema efektivitas, efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKU manual masih dipertahankan karena memberikan kemudahan akses data secara cepat, berfungsi sebagai cadangan data, serta membantu proses verifikasi dan pengendalian internal ketika terjadi kendala pada SIPD RI. Penggunaan BKU manual dinilai efektif dalam mendukung akurasi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan. Oleh karena itu, BKU manual masih relevan dipertahankan sebagai pendamping SIPD RI dengan penggunaan yang terbatas dan proporsional, bukan sebagai sistem pencatatan utama.

Kata kunci: Administrasi Keuangan Regional; Akuntabilitas; Efektivitas; Manual BKU; SIPD RI.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah di Indonesia mulai mengadopsi berbagai sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Sebagai bentuk komitmen terhadap digitalisasi tata kelola pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjalin sinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) untuk memantapkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 391, mewajibkan pemerintah untuk menyediakan sistem informasi yang memuat tentang pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi daerah lainnya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis terkait Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD RI didesain sebagai sistem terpadu yang terintegrasi dengan alur proses dan data yang mengalir, bertujuan untuk menciptakan satu data yang terpusat dan saling terhubung antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, SIPD RI hadir sebagai kebijakan hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah serta mendukung Satu Data Indonesia dan menjadi aplikasi umum SPBE. SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan layanan kepada pengguna, dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas proses pemerintahan.

Meskipun sistem informasi telah dikembangkan secara terpusat dan modern, dengan adanya kendala dalam pelaksanaannya sedangkan tidak ada cadangan data dalam bentuk lain, maka dalam praktiknya tidak sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih mempertahankan pencatatan manual, khususnya melalui Buku Kas Umum (BKU) Manual, sebagai pendamping pencatatan digital seperti SIPD RI. Keberadaan pencatatan manual ini dipertahankan sebagai cadangan apabila terjadi kendala seperti yang disebutkan di atas, selain itu juga digunakan sebagai media pencocokan data jika terjadi kesalahan input, master data kepada stakeholder penatausahaan keuangan kemantren mergangsan karena keterbatasan dalam penguasaan teknologi oleh aparatur pelaksana. Fenomena ini juga ditemukan di SKPD Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Bendahara Pengeluaran Kemantren Mergangsan membuat BKU Manual sebagai pendamping modul penatausahaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). BKU manual ini dibuat sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada berjalannya proses penatausahaan keuangan di Kemantren Mergangsan

Namun demikian, penggunaan pencatatan manual secara bersamaan dengan sistem digital menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Dalam konteks sistem informasi akuntansi, mekanisme pencatatan dan pengendalian internal di dalam sistem digital dan manual secara bersama-sama dapat memperkuat keandalan informasi. Namun, penerapan kontrol internal juga berpotensi meningkatkan beban kerja operasional apabila belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya dan sistem yang memadai (Etmunda Felicyta R. Djati, 2022). Di satu sisi, pencatatan manual dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan pengendalian internal tambahan. Di sisi lain, praktik ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja, serta potensi inkonsistensi informasi antara sistem dan dokumen fisik. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana keberadaan

BKU manual masih relevan dan mampu mendukung sistem informasi secara optimal, atau justru menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Implementasi SIPD bertujuan untuk meningkatkan integrasi data, efisiensi pengelolaan keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, pemanfaatan SIPD telah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah. (Muhammad Irfan Nasution, 2021) menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan telah menggunakan aplikasi SIPD sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah yang mendukung program-program pemerintah daerah.

Namun demikian, penerapan SIPD tidak terlepas dari berbagai kendala. Penelitian (Agustin Maulani, 2024) menemukan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi SIPD, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta perbedaan tingkat kesiapan antar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi, dalam pelaksanaannya masih diperlukan mekanisme pendukung untuk memastikan kelancaran dan keandalan penatausahaan keuangan daerah

Buku Kas Umum (BKU) Manual

Dalam praktik pengelolaan kas, pencatatan manual berbasis spreadsheet sering digunakan sebagai cadangan pencatatan ketika sistem utama mengalami kendala teknis sehingga dapat mengurangi potensi kehilangan data (Dian Khofifah Eka Putri, 2023). BKU manual dalam penelitian ini tidak berbentuk pencatatan tulis tangan, tetapi pencatatan berbasis spreadsheet (Google Spreadsheet) yang dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi langsung dengan SIPD RI. Oleh karena itu, BKU tersebut tetap dikategorikan sebagai BKU manual karena berfungsi sebagai pencatatan pendamping di luar sistem resmi.

Efektivitas

(Deksa Imam Suhada, 2022) menjelaskan bahwa efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari aspek hasil maupun ketepatan waktu pelaksanaannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan sistem atau prosedur yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan pengelolaan keuangan secara optimal.

Efisiensi

Efisiensi menunjukkan kemampuan suatu kegiatan dalam mencapai target yang telah direncanakan melalui penggunaan struktur, prosedur, dan sumber daya yang tepat sehingga tidak terjadi pemborosan waktu maupun tenaga (Amni Zarkasyi Rahman, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara tepat guna tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Efisiensi biasanya mengacu pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya seperti uang, tenaga kerja, waktu, atau bahan yang digunakan untuk mencapainya. Optimalisasi penggunaan sumber daya merupakan tujuan utama dalam mencapai efisiensi (Dian Anita, 2024).

Dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), efisiensi tercermin dari kemudahan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang terintegrasi. Sistem yang efisien diharapkan mampu meminimalkan proses berulang, mempercepat alur kerja, serta mengurangi beban administrasi bagi pelaksana penatausahaan keuangan.

Akurasi

Akurasi merupakan salah satu karakteristik penting dalam informasi keuangan. Informasi yang memiliki tingkat akurasi tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan secara tepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akurasi data sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara transaksi keuangan, bukti pendukung, dan laporan keuangan yang dihasilkan. Akurasi informasi keuangan mendukung keandalan laporan keuangan serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, kekeliruan pelaporan, dan potensi temuan dalam proses pemeriksaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akurasi informasi keuangan merupakan bagian dari keandalan informasi yang mendukung akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2021).

Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas berperan dalam menciptakan lingkungan pengelolaan yang sehat dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan. Transparansi memastikan tersedianya informasi yang relevan dan akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga keputusan dapat diambil secara rasional dan bertanggung jawab (Ritonga, 2024). Tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan menandakan komitmen institusi terhadap akuntabilitas, integritas, dan partisipasi publik. Ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik (Idah Rosidah, 2023)

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, transparansi tercermin dari tersedianya informasi keuangan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat ditelusuri, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang transparan memungkinkan proses pengawasan dan pemeriksaan berjalan lebih optimal serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan good governance. Implementasi teknologi informasi perlu diiringi dengan pengelolaan risiko dan penanganan berbagai kendala yang mungkin muncul. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah juga harus didukung melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Mauni, 2025)

Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas tercermin dari keterlacakan transaksi keuangan, kelengkapan dokumen pendukung, serta kemudahan dalam proses pemeriksaan dan audit. Sistem penatausahaan keuangan yang akuntabel memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dari awal hingga akhir, sehingga mendukung proses pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian (Febriana Nafi'ah Vidyasari, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penggunaan Buku Kas Umum (BKU) manual berdasarkan pengalaman dan pandangan para pengguna. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat kontekstual dan menggambarkan praktik nyata penggunaan BKU manual sebagai pendamping SIPD RI.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena peneliti menginisiasi penerapan BKU manual di instansi tersebut sebagai bagian dari intervensi penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober–Desember 2025, dengan pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 2025.

Sumber data penelitian berasal dari informan yang terlibat langsung dalam penggunaan BKU manual, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap penatausahaan keuangan. Informan meliputi bendahara, pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta petugas urusan di Kemantren Mergangsan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan instrumen berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka.

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, reduksi, pengelompokan, dan kategorisasi data ke dalam tema alasan penggunaan BKU manual, efektivitas, efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas BKU manual sebagai pendamping SIPD RI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi BKU Manual sebagai Pendamping SIPD RI

Pembahasan ini ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan penggunaan Buku Kas Umum (BKU) manual dalam praktik penatausahaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKU manual masih memiliki relevansi yang signifikan sebagai pendamping SIPD RI dalam penatausahaan keuangan di Kemantren Mergangsan. BKU manual tidak semata-mata dipahami sebagai kebiasaan administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen pengendalian tambahan, khususnya dalam pencadangan data dan verifikasi silang terhadap data yang tercatat dalam SIPD RI. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa

penyediaan backup data manual merupakan solusi penting dalam mengatasi kendala teknis SIPD (Kadek Gita Sari Cahyanti, 2024).

Keberadaan BKU manual menjadi penting mengingat ketergantungan penuh pada sistem berbasis elektronik berpotensi menimbulkan risiko operasional, seperti gangguan jaringan, keterlambatan input, maupun kesalahan teknis sistem. Dalam perspektif sistem informasi akuntansi, keandalan informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh efektivitas pengendalian internal dan keberadaan sistem pendukung yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BKU manual berperan sebagai manual control yang melengkapi application control pada SIPD RI, sehingga mampu memperkuat keandalan dan keterlacakan data keuangan.

Selain itu, penggunaan BKU manual mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential approach*) dalam pengelolaan keuangan daerah. BKU manual membantu menjaga kontinuitas pencatatan keuangan ketika SIPD RI belum dapat diakses secara optimal. Dengan demikian, penggunaan BKU manual tidak dapat dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap digitalisasi, melainkan sebagai strategi adaptif dalam masa transisi menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan andal.

Efektivitas Penggunaan BKU Manual

Efektivitas penggunaan BKU manual dalam penelitian ini dilihat dari kemampuannya dalam mendukung ketertiban administrasi, meningkatkan keandalan data keuangan, serta memperkuat fungsi pengendalian internal dalam proses penatausahaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKU manual mampu mendukung akurasi pencatatan dan memudahkan proses verifikasi data, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Namun demikian, penerapan BKU manual secara bersamaan dengan SIPD RI juga menimbulkan pekerjaan ganda bagi petugas penatausahaan. Petugas harus melakukan pencatatan transaksi baik secara manual maupun melalui sistem SIPD RI, yang berdampak pada peningkatan beban kerja dan waktu pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off antara efektivitas dan efisiensi, di mana peningkatan efektivitas dicapai dengan konsekuensi berkurangnya efisiensi operasional.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membandingkan pencatatan manual dan pencatatan berbasis aplikasi akuntansi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencatatan manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan penyajian laporan, serta pekerjaan berulang, sehingga kurang efisien apabila tidak didukung oleh sistem yang terintegrasi. Meskipun berbeda konteks, temuan ini menguatkan hasil

penelitian bahwa penggunaan pencatatan manual efektif sebagai alat pengendalian dan verifikasi, namun optimalisasinya perlu disertai dengan penyederhanaan alur kerja agar tidak menimbulkan beban administratif tambahan (Restu Rahmatunissa Az-Zahra, 2022).

Dampak Penggunaan BKU Manual terhadap Efisiensi, Akurasi, dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa BKU manual digunakan sebagai alat kontrol dan pendamping SIPD RI dalam mencatat setiap transaksi keuangan. Pencatatan manual memudahkan proses penelusuran transaksi secara kronologis, terutama ketika diperlukan klarifikasi atas pengeluaran atau penerimaan kas. Hal ini mempermudah proses pemeriksaan internal maupun audit.

Selain itu, BKU manual membantu menjaga konsistensi antara pencatatan manual dan pencatatan dalam SIPD RI. Ketika terjadi perbedaan data atau kendala teknis sistem, BKU manual digunakan sebagai referensi pembanding untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, BKU manual berperan sebagai bukti pendukung yang memperkuat proses pertanggungjawaban keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Safiah Allisa, 2023) bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas menjadi elemen penting yang memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan, baik melalui sistem elektronik maupun pencatatan pendamping, dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja organisasi sektor publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan Buku Kas Umum (BKU) manual sebagai pendamping Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa BKU manual masih dipertahankan karena memiliki fungsi penting sebagai instrumen pengendalian dan cadangan (backup) data. BKU manual digunakan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan potensi dobel entry, serta berperan sebagai alat pencocokan data ketika terjadi kendala teknis pada SIPD RI. Keberadaan BKU manual juga membantu menjaga ketertiban administrasi dan keterlacakan transaksi keuangan. Selain itu, penggunaan BKU manual dinilai efektif dalam mendukung proses penatausahaan keuangan daerah, khususnya dalam membantu pencatatan, pencocokan, dan penelusuran transaksi ketika SIPD RI tidak dapat diakses secara optimal. Dengan demikian, BKU manual masih relevan digunakan sebagai pendamping SIPD RI guna menjaga kelangsungan proses penatausahaan keuangan. Lebih lanjut, penggunaan BKU manual memberikan dampak positif terhadap

efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi efisiensi, BKU manual memudahkan pencarian arsip dan mempercepat proses administrasi. Dari sisi akurasi, pencatatan manual meningkatkan ketelitian serta mengurangi risiko kesalahan input data. Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, BKU manual berfungsi sebagai alat kontrol dan bukti pendukung yang memperkuat proses pemeriksaan dan audit keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin Maulani, D. (2024). Inovasi teknologi dalam pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai alat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1415-1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Amni Zarkasyi Rahman, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 117-126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Deksa Imam Suhada, D. R. (2022). Efektivitas para pelaku ekonomi dalam menunjang pertumbuhan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3201-3208. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1315>
- Dian Anita, M. N. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 2457-2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>
- Dian Khofifah Eka Putri, D. P. (2023). Penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan kas sebagai upaya pengendalian internal di Kantor BAZNAS Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)*, 672-682. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.2951>
- Etmunda Felicyta R. Djati, M. N. (2022). Pengaruh pengendalian intern dan kinerja karyawan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 12-26. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v1i2.2224>
- Febriana Nafi'ah Vidyasari, B. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857>
- Idah Rosidah, D. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah (Studi kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 137-156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Kadek Gita Sari Cahyanti, D. N. (2024). Penerapan, hambatan, dan solusi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam pelayanan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD di BPKPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 347-358. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.80176>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mauni, C. (2025). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 104-115. Retrieved from <https://isora.safar.id/index.php/isora>

- Muhammad Irfan Nasution, N. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 109-116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Restu Rahmatunissa Az-Zahra, S. M. (2022). Perbandingan pencatatan data keuangan usaha dagang menggunakan teknik manual dan penginputan Zahir Accounting. *Journal of Accounting Information System*, 1-9. <https://doi.org/10.31294/jais.v2i01.1281>
- Ritonga, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 323-336. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Safiah Allisa, D. H. (2023). Peran akuntabilitas pada pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 170-178. <https://doi.org/10.51213/ema.v8i2.383>